



Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

Disebut Menuai Laba, Begini Tanggapan BPJS Kesehatan

Jakarta (06/08/2020) - Beredarnya kabar bahwa BPJS Kesehatan mendulang keuntungan atau laba dengan adanya kenaikan iuran JKN-KIS, ditepis oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf. Ia menjelaskan, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) yang menjadi dasar BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program JKN-KIS, berpegang pada prinsip nirlaba.

"Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan menganut prinsip nirlaba. Artinya, pengelolaan Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta," ungkap Iqbal, Kamis (06/08).

Iqbal menerangkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 40, BPJS Kesehatan mengelola dua jenis aset, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan wajib memisahkan aset DJS dan aset BPJS.

"Aset DJS merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial," papar Iqbal.

Sementara, aset BPJS adalah aset lembaga atau badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial yang bersumber dari modal awal dari Pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS, dana operasional yang diambil dari DJS dan/atau sumber lain yang sah, untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, biaya pengadaan barang dan jasa, biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan dan investasi dalam instrumen investasi.

"Penting diperhatikan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan, BPJS Kesehatan menampilkan dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan DJS dan laporan keuangan BPJS. Jadi harus diluruskan, yang dimaksud laba itu aset yang mana, aset DJS atau aset BPJS," kata Iqbal.

Pada tahun 2019, laporan keuangan DJS (audited) mencatat aset neto sebesar minus Rp50,99 triliun, menurun sebesar Rp17,04 triliun dari realisasi tahun 2018 sebesar minus Rp33,96 triliun. Per 31 Desember 2019, DJS mencatat total aset sebesar Rp1,68 triliun, menurun 12,42% dari tahun 2018 sebesar Rp1,91 triliun.

Sedangkan untuk BPJS, laporan keuangan tahun 2019 (audited) mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp369,07 miliar, meningkat Rp426,40 miliar dari realisasi tahun 2018 sebesar minus Rp57,33 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut terutama ditopang oleh capaian pendapatan investasi yang meningkat Rp306,76 miliar (neto) dari tahun 2018 sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi, dengan Yield on Investment (YOI) sebesar 7,46% meningkat 92,76% dari tahun 2018 sebesar 3,87%. Per 31 Desember 2019, BPJS mencatat total aset sebesar Rp13,26 triliun, meningkat 4,50% dari tahun 2018 sebesar Rp12,69 triliun.

"Jadi perlu kami luruskan bahwa aset DJS dan aset BPJS Kesehatan adalah dua hal yang dikelola secara terpisah, sehingga tidak benar jika kenaikan iuran berpengaruh terhadap laba BPJS Kesehatan," tegas Iqbal.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter : @BPJSKesehatanRI

Instagram : @bpjskesehatan_ri

Facebook : BPJS Kesehatan

Youtube : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus : bpjskesehatan

PRESS RELEASE

Being Mentioned Gaining The Profits, Here's the Response of BPJS Kesehatan

Jakarta (06/08/2020) - News circulating that BPJS Kesehatan is gaining profits or profits from the increase of JKN-KIS contributions, was denied by the Head of Public Relations of BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf. He explained that the Health Social Security System (SJSN) which is the basis for BPJS Kesehatan in running the JKN-KIS Program, adheres to the principle of non-profit.

"As a public legal entity, BPJS Kesehatan adheres to the principle of non-profit. This means that the management of JKN-KIS Program by BPJS Kesehatan prioritizes the use of the development of funds to provide maximum benefit to all participants," said Iqbal, Thursday (06/08).

Iqbal explained, in accordance with Law Number 24 Year 2011 Article 40, BPJS Kesehatan manages two types of assets, namely Social Security Fund (DJS) assets and Social Security Administrative Body (BPJS) assets. BPJS Kesehatan is required to separate DJS assets from BPJS assets.

"DJS assets are trust funds belonging to all participants, which are the collection of contributions and the results of their development which are managed by BPJS Kesehatan for payment of participants benefits and operational funding for the implementation of social security programs," said Iqbal.

Meanwhile, BPJS assets are assets of institutions or agencies that administer social security programs sourced from initial capital from the Government, the transfer of assets of State-owned enterprises which administering social security programs, results of development of BPJS assets, operational funds drawn from DJS and/or other legal sources; to be used as operational costs for implementing social security programs, costs for procurement of goods and services, costs for capacity building services and investment in investment instruments.

"It is important to note that in presenting financial reports, BPJS Kesehatan presents two types of financial reports, namely DJS financial statements and BPJS financial statements. So it can be straightened which assets that earns the profit, is it DJS assets or BPJS assets," said Iqbal.

In 2019, the DJS financial report (audited) recorded net assets of minus IDR 50.99 trillion, decreased by IDR 17.04 trillion, from the realization in 2018 of minus IDR 33.96 trillion. As of December 31, 2019, DJS recorded total assets of IDR 1.68 trillion, a decrease of 12.42% from 2018 of IDR 1.91 trillion.

As for the BPJS assets, the audited financial statements for 2019 recorded current year profit of Rp369.07 billion, an increase of Rp426.40 billion from the realization in 2018 of minus Rp57.33 billion. The increase in profit for the year was mainly supported by the achievement of investment income which increased by Rp306.76 billion (net) from 2018 in line with improving economic conditions, with Yield on Investment (YOI) of 7.46%, an increase of 92.76% from 2018 of 3.87%. As of December 31, 2019, BPJS recorded total assets of IDR 13.26 trillion, an increase of 4.50% from 2018 of IDR 12.69 trillion.

"So we need to clarify that DJS assets and BPJS Kesehatan assets are two things that are managed separately, so it is not true if the increase in contributions affects BPJS Kesehatan earnings," said Iqbal.